

MODEL-MODEL GERAKAN NGO LINGKUNGAN Studi Kasus di Yogyakarta*

Oleh: Suharko**

Abstract

This paper describes NGOs as an agent of environmental movement, especially in Yogyakarta. The paper focuses on modes of environmental movement. At least, there are three modes of environmental NGOs, that is: instrumental, sub-cultural, and contra-cultural movement. Environmental NGOs in Yogyakarta tend to have the same mode of one, although their activities varies. The mode of movement is sub-cultural movement. The NGOs movement does not change the dominant culture (capitalistic culture), which causes environmental problems. Their activities only encourage and support awareness and concern on environmental problems in the context of dominant culture.

Pendahuluan

Saat ini isu tentang lingkungan telah menjadi wacana global, di samping isu hak asasi manusia dan isu gender. Berawal dari isu sederhana tentang pelestarian alam demi tujuan rekreasi, isu lingkungan kemudian bergulir, berproses, dan melembaga sebagai gerakan yang banyak dilakukan oleh NGO lingkungan. Dalam perkembangannya, NGO lingkungan memang lebih tampak sebagai agen utama dalam gerakan lingkungan, yang dinamikanya dicerminkan pada munculnya berbagai ragam NGO lingkungan.

Tulisan ini akan mengkaji perkembangan NGO lingkungan, melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah ragam NGO lingkungan juga diikuti oleh variasi model-model gerakan lingkungan yang dikembangkan? Jika benar, variasi model seperti apa yang ditunjukkan oleh NGO sebagai agen gerakan lingkungan? Bagaimana dengan variasi model gerakan lingkungan yang dilakukan oleh NGO lingkungan di Indonesia?

Apa saja limitasi dari model gerakan NGO lingkungan tersebut jika dikaitkan dengan sebab, karakteristik dan skala krisis lingkungan yang terjadi? Jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut akan dipaparkan pada tiga bagian tulisan. Dimulai dengan menggambarkan perkembangan isu lingkungan, pengkajian diteruskan pada penelaahan model-model gerakan lingkungan yang dilakukan oleh NGO lingkungan di berbagai belahan dunia. Pada dua bagian tersebut, khususnya untuk melengkapi gambaran tentang gerakan NGO lingkungan di Indonesia, penulis juga mendasarkan pada studi kasus yang penulis lakukan terhadap 8 NGO lingkungan di Yogyakarta, pada akhir tahun 1996 hingga awal tahun 1997. Tulisan ini diakhiri dengan suatu refleksi teoritis dan praktis atas maraknya gerakan lingkungan dewasa ini.

Perkembangan Isu dan NGO Lingkungan

Perkembangan isu lingkungan menjadi isu global merupakan hasil dari suatu proses sosial yang bisa disebut sebagai gerakan lingkungan (*environmental movement*). Gerakan itu telah berlangsung sejak lama dan melibatkan banyak agen atau aktor. Akar historis gerakan lingkungan dapat ditelusuri hingga pertengahan abad ke-19 di Eropa dan Amerika Serikat. Gerakan lingkungan di Inggris, misalnya, telah dimulai sejak abad ke-19 (Garner, 1996: 63). Pada saat itu, gerakan lingkungan dapat dibedakan ke dalam tiga kategori. Pertama, kelompok-kelompok yang peduli dengan pelestarian daerah-daerah pinggiran (*countryside*) sebagai tempat yang indah untuk lari dari segala kepenatan bagi penduduk yang tinggal di daerah industri-perkotaan. Kedua, kelompok-kelompok yang peduli terhadap konservasi alam. Berbeda dari kelompok yang pertama, yang cenderung mengejar aspek rekreasi dan keindahan, pendirian kelompok yang kedua ini lebih didasarkan pada alasan ilmiah untuk mempromosikan pelestarian alam. Ketiga, kelompok-kelompok yang secara khusus tertarik pada upaya perlindungan terhadap binatang-binatang tertentu.

* Tulisan ini dikembangkan dari tesis penulis yang dikemas secara khusus untuk tujuan penastitan ini. Bagi pembaca yang berminat untuk membaca secara utuh tesis tersebut, lihat: Suharko, *NGO dan Gerakan Hijau (Studi tentang Ideologi dan Model Gerakan Lingkungan di Yogyakarta)*, Program Studi Sosiologi, Program Paska Sarjana UGM, 1997, tidak dipublikasikan.

** Staf pengajar jurusan Sosiologi, Fisipol, UGM, dan peneliti pada IRE (*Institute for Research and Empowerment*).

Latar belakang gerakan yang ketiga ini adalah adanya perlakuan yang kejam terhadap binatang oleh kelas pekerja perkotaan dan kaum aristokrat, seperti perlakuan terhadap kuda penarik kereta, penggunaan binatang untuk umpan berburu, dan lain-lain. Hal di atas menunjukkan bahwa gerakan lingkungan sebenarnya bukanlah wacana yang baru sama sekali. Tidak berlebihan jika Goodin (1992) mengatakan bahwa gerakan hijau ibarat "anggur tua dalam botol baru" (*old wine in the new bottles*).

Sekalipun gerakan lingkungan dapat dijejaki jauh ke masa lalu, para pengamat sepakat bahwa gerakan hijau berkembang pesat memasuki akhir tahun 1950-an, yang terutama ditandai jumlah anggota yang makin besar dan perhatian publik yang makin meluas. Berbeda dengan periode sebelumnya (periode abad ke-19), gerakan hijau sejak 1950-an, atau bisa juga disebut sebagai periode modern, yang ditandai oleh dua ciri menonjol, yakni tampil dalam bentuk gerakan massa dan mengedepankan interdependensi antar masalah lingkungan daripada gerakan berisu tunggal (Garner, 1996).

Perkembangan yang demikian agaknya bersesuaian dengan tingkat krisis lingkungan yang makin akut. Para pengamat membagi perkembangan krisis lingkungan ke dalam dua periode, yakni krisis lingkungan pertama dan krisis lingkungan kedua (Goodin, 1992). Periode krisis lingkungan pertama dipicu oleh publikasi buku *Silent Springs* karya Rachel Carson pada tahun 1962. Carson mengkritik penggunaan dan produksi pestisida (DDT) secara besar-besaran di Amerika. Dengan merujuk pada derita yang dialaminya sendiri, ia menyimpulkan bahwa pemakaian DDT telah menimbulkan dampak samping yang berwujud penyakit kanker. Menurut Sale, buku Carson telah merangsang dinamika kelompok-kelompok lingkungan yang sebelumnya tidak diperhatikan kehadirannya, dan membangkitkan semangat kelompok-kelompok konversi tradisional dan juga kelompok lainnya yang sebelumnya tidak pernah memikirkan kepentingan lingkungan. Gerakan lingkungan, dalam arti yang aktif, vokal, merakyat, dan berpengaruh, dapat dikatakan tidak ada sebelum publikasi buku Carson ini (Sale, 1996:3-5).

Fokus tindakan sosial dan tekanan politik yang diberikan dalam periode krisis lingkungan pertama ini lebih dilihat pada kondisi individual, seperti polusi air sungai yang disebabkan oleh limbah suatu industri. Kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi krisis masih ditempatkan pada level nasional. Atau jika ditempatkan pada level internasional hanyalah bersifat sebagai replikasi dari suatu kebijakan level nasional di suatu negara yang ditiru di negara lain.

Berbeda dengan krisis lingkungan pertama, pada periode krisis lingkungan kedua, baik akar penyebab maupun kebijakan yang diambil berskala global (Goodin, 1992:4). Menurut Homer-Dixon (1994), penyebab krisis lingkungan tersebut mencakup enam sumber, yaitu perubahan iklim yang disebabkan oleh efek rumah kaca, penipisan lapisan ozon, degradasi dan hilangnya tanah pertanian yang subur, degradasi dan penggundulan hutan, pengurangan dan polusi suplai air bersih, dan penipisan daerah tangkapan ikan. Keenam sumber perubahan lingkungan tersebut, disertai dengan pertumbuhan penduduk dan distribusi sumberdaya yang tidak merata¹, telah menimbulkan apa yang ia sebut sebagai kelangkaan lingkungan (*environmental scarcity*).

Sebagai isu global, masalah lingkungan mendapat perhatian serius dari hampir semua negara di dunia. Sebab, problem dan krisis lingkungan tersebar ke setiap negara, meski dengan ragam dan derajat yang berbeda-beda. Seluruh negara di dunia terlibat dalam mencari solusi terhadap persoalan tersebut. Negara-negara yang tergabung dalam G7, meskipun sudah agak terlambat, akhirnya mengagendakan isu ini pada pertemuan mereka pada tahun 1989. Ini menandai bahwa persoalan lingkungan yang sebelumnya dianggap berada dalam wilayah *low politics* — isu minor yang menjadi urusan para teknisi — tiba-tiba dikaitkan dengan isu-isu sentral politik dunia. Isu lingkungan global menjadi soal ketiga terpenting mendampingi agenda klasik dalam politik internasional, yakni soal keamanan dan ekonomi (Saidi, 1995).

Puncak dari semua itu adalah diselenggarakannya konferensi tentang *Biodiversity* di Rio de Janeiro Brasil tahun 1992 dan hasilnya telah diratifikasi oleh sebagian besar negara di dunia. Konferensi ini dihadiri oleh 150 negara dan 2500 NGO². KTT Bumi ini juga telah melahirkan kebutuhan akan kode

¹ Dalam argumen yang hampir sama, Berger mengidentifikasi tiga penyebab pokok terjadinya degradasi lingkungan, pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, pertumbuhan penduduk yang membutuhkan sumberdaya alam yang makin besar, dan industrialisasi yang telah menciptakan pola konsumsi dan produksi yang mengabaikan kelangsungan sumberdaya alam. Lihat, Johannes Berger, "The Economy and the Environment", dalam Smelser & Swedberg (Eds.), *Handbook of Economic Sociology*, New York: Russel Sage Publication, 1994.

² Untuk konteks Indonesia, istilah NGO atau terjemahannya Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) cenderung dihindari terutama oleh kalangan pemerintah. Istilah yang biasa dipergunakan adalah LSM atau LPSM. Namun dalam perkembangan kemudian istilah LSM ini dipakai untuk menunjuk kepada organisasi-organisasi sosial bentukan pemerintah dan menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan. Karena itu, muncul keinginan kuat untuk kembali mempergunakan istilah ORNOP atau NGO untuk merujuk pada organisasi yang bergiat dengan berbagai aktivitas untuk mendorong proses transformasi sosial.

etik dalam memperlakukan lingkungan, sehingga kerusakan bumi tidak menjadi semakin parah. Gagasan ini terefleksi dari pendirian *Business Council for Sustainable Development* (BCSD), yang merupakan wadah para pengusaha di 50 negara anggota untuk mengembangkan sikap moral atau kode etik terhadap lingkungan. Gagasan untuk membiayai berbagai program hijau juga telah melahirkan organisasi Palang Hijau Internasional (*International Green Cross*), sebagai wadah pengumpulan dana lingkungan (Saidi, 1995).

Sebagai suatu gerakan yang aktif dan menyentuh dimensi publik yang luas, gerakan lingkungan berkembang belum lama di Indonesia. Gerakan lingkungan di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, menurut Durning (1989) muncul dan tumbuh pesat dalam dua dekade terakhir. Gerakan lingkungan ini tumbuh sebagai bagian dari gerakan akar rumput (*grassroot movement*), yang menentang proses perusakan lingkungan lokal³ secara sistematis di negara-negara berkembang, seperti India, Brasil, Bangladesh, Thailand⁴, dan lain-lain.

Untuk konteks Indonesia, kebijakan publik yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sebenarnya telah dikembangkan sejak jaman pemerintahan kolonial Belanda, melewati pemerintahan Orde Lama, dan memperoleh pijakan yang kuat sejak awal tahun 1970-an. Hardjosoemantri (1996) membagi perkembangan kebijakan lingkungan hidup sejak awal tahun 1970-an ke dalam tiga periode. Pertama adalah periode tahun 1970-1980. Periode ini ditandai oleh masuknya agenda persoalan lingkungan hidup ke dalam rumusan GBHN 1973, yang kemudian dijabarkan dalam Repelita II (1974-1979). Masuknya agenda persoalan lingkungan ini merupakan akomodasi dari Deklarasi Stockholm yang dihasilkan oleh Konferensi tentang *Biosphere* di Stockholm tahun 1972. Deklarasi ini juga telah menjadi inspirasi bagi pemerintah untuk membentuk Panitia Interdepartemen, berdasar Keppres No. 16 tahun 1972.

³ Gerakan hijau menentang perusakan lingkungan lokal yang memiliki gema mendunia dan memberikan inspirasi di berbagai belahan dunia lain, adalah gerakan Chipko di Uttar Pradesh, India. Gerakan ini muncul pada awal 1970-an untuk menentang penebangan hutan secara serampangan di negara bagian ini, yang berakibat menipiskan sumberdaya alam yang vital bagi kehidupan penduduk yang tinggal disekitarnya. Lihat Alan B. Durning, *Action at the Grassroots: Fighting Poverty and Environmental Decline*, *Worldwatch Paper* No. 88, Januari, 1989.

⁴ Di negara Gajah Putih ini, gerakan lingkungan dilakukan oleh penduduk lokal dan mendapat dukungan dari NGO. Untuk gambaran ringkas mengenai gerakan lingkungan di Thailand dalam menentang perusakan keanekaragaman hayati, lihat Larry Lohmann, "Siapa yang Mempertahankan Keanekaragaman Hayati?", dalam Vandana Shiva dkk, *Perspektif Sosial dan Ekologi Keanekaragaman Hayati*, KONPHALINDO, Jakarta, 1993.

Panitia ini menghasilkan dua rekomendasi penting, yakni perlunya pembentukan lembaga khusus yang mengelola lingkungan hidup di tingkat pusat dan daerah, dan perangkat perundang-undangan lingkungan hidup. Rekomendasi yang pertama ditindaklanjuti dengan didirikannya Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (1978), yang selanjutnya berubah menjadi Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (1983), dan kini menjadi Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (1993). Selain itu, pada periode Pelita III terbentuk sekitar 28 Pusat Studi Lingkungan (PSL) di berbagai universitas di seluruh Indonesia. Kelahiran PSL-PSL ini memiliki andil yang penting dalam membantu pemerintah, terutama dalam aspek pengembangan wawasan masyarakat dalam melihat masalah lingkungan hidup, melalui berbagai penelitian dan kajian tentang lingkungan hidup⁵.

Kedua, periode 1980-1988 ditandai oleh penguatan perangkat perundangan tentang lingkungan hidup. Sebagai hasil dari rekomendasi yang kedua dari panitia tersebut, dihasilkan UU No. 4 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH)⁶. Undang-undang organik yang merupakan kelanjutan dari UU Lingkungan Hidup tersebut juga diberlakukan pada periode ini, yakni UU No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian dalam rangka pelaksanaan pembangunan industri berwawasan lingkungan, dan PP No. 29 tahun 1986 (selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 1993 diganti oleh PP No. 51 tahun 1993) mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Periode ketiga, tahun 1988 hingga sekarang ini ditandai oleh masuknya rumusan Deklarasi Rio (hasil konferensi Keragaman Hayati di Rio de Janeiro Brasil 1992) ke dalam GBHN 1993. Pada waktu ini, pemerintah Indonesia

⁵ Lihat Abdullah Kamil, "Napak Tilas Pembangunan Lingkungan Hidup", dalam majalah *Pancaroba*, yang diterbitkan Dana Mitra Lingkungan (DML), musim Kemarau, 1995.

⁶ UU tersebut telah disempurnakan ke dalam UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 tahun 1997. Rancangan UU ini sempat mengundang kritik dari para aktivis lingkungan dan NGO, terutama karena dihilangkannya eksistensi LSM (NGO) dalam pengelolaan lingkungan, sebagaimana secara eksplisit dinyatakan dalam UU Nomor 4/1982. Istilah LSM diganti dengan istilah Organisasi Lingkungan. Alasan pokoknya, menurut Sarwono Kusumaatmadja, adalah bahwa gerakan lingkungan hidup sudah makin meluas bukan saja dikerjakan oleh LSM tetapi juga Ormas dan masyarakat adat. UU ini juga memuat tentang praktik baru dalam bidang hukum, yaitu gugatan perwakilan (*class action*), yang bisa diajukan oleh organisasi yang berbadan hukum dan anggaran dasarnya dengan tegas menyatakan tujuannya untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Lihat, *Kompas*, 27 September 1997.

meratifikasi Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, yang kemudian dituangkan dalam UU No. 5 tahun 1994. Hal yang sama dilakukan terhadap Konvensi tentang perubahan Iklim dan diundangkan melalui UU No. 6 tahun 1994.

Dalam konteks gerakan NGO di Indonesia, isu lingkungan, menurut Purnomo dkk (1989), sebenarnya telah masuk dalam agenda gerakan semenjak tahun 1970-an. Pada masa ini NGO di Indonesia tumbuh pesat, ibarat cendawan di musim hujan, menyusul terjadinya pertumbuhan ekonomi yang pesat yang diiringi oleh ketimpangan ekonomi yang makin melebar. Gerakan NGO pada masa ini lebih menekankan pada isu ketimpangan ekonomi dan kemiskinan daripada isu lingkungan. Baru ketika banyak NGO menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi juga diikuti oleh kerusakan lingkungan dan ekologi yang makin parah, isu lingkungan mendapatkan artikulasi lebih kuat. Eldridge (1995) menyatakan bahwa gerakan lingkungan ini merupakan "gelombang kedua" (*second wave*) dari aktivisme NGO di Indonesia. Wujud konkrit dari gelombang kedua ini adalah UULH No.4 tahun 1982 yang banyak mengakomodasi masukan dari NGO lingkungan dan bahkan melegitimasi eksistensi dan peran NGO dalam konteks pembangunan. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) berdiri pada 15 Oktober 1980 sebagai forum komunikasi LSM yang berminat dan bergerak di bidang lingkungan hidup. Karena itu, dapat dikatakan bahwa gerakan NGO lingkungan di Indonesia memperoleh momentum penguatannya pada periode 1980-an.

Sekalipun tidak ada angka yang pasti mengenai berapa jumlah NGO yang bergerak di bidang lingkungan hidup, dari data mengenai perkembangan jumlah NGO yang kini diperkirakan mencapai jumlah antara 1.000-2.000 organisasi (Saidi, 1995), bisa diduga bahwa NGO yang bergerak di bidang ini juga makin meningkat. WALHI, misalnya, merupakan forum dari sekitar 150 NGO yang memiliki aktivitas gerakan lingkungan hidup. Mereka juga memiliki aktivitas gerakan hijau⁷ yang beragam, mulai dari sekedar gerakan menanam pohon langka hingga gerakan advokasi lingkungan yang menyentuh dimensi publik yang luas. Karena itu, sebagaimana konteks NGO pada umumnya yang plural dan heterogen, konteks NGO lingkungan pun memiliki keragamannya sendiri, seperti pelangi, berbeda-beda warnanya. Bisa diduga pula bahwa model gerakan hijau yang dikembangkan oleh NGO lingkungan, memiliki variasinya sendiri.

⁷ Gerakan lingkungan seringkali juga disebut dengan gerakan hijau (*green movement*). Dalam tulisan ini kedua istilah tersebut silih berganti digunakan dengan makna yang sama.

NGO dan Model-model Gerakan Lingkungan

NGO sebagai Agen Gerakan Lingkungan

Pengertian agen secara umum menunjuk pada aktor individual, yang dalam kondisi sesulit apapun memiliki kemampuan untuk merumuskan pemecahan dan mengambil keputusan. Pengertian ini juga dapat diperluas ke entitas sosial lain, seperti: agen negara, partai politik, organisasi sosial, NGO dan lain-lain, yang juga memiliki kemampuan merumuskan dan melaksanakan suatu keputusan (Long, 1990). Namun, hal ini bukan berarti bahwa konsep agen dapat disamakan dengan kapasitas membuat keputusan. Agen tersusun dari relasi-relasi sosial dan hanya dapat efektif melalui relasi-relasi sosial tersebut. Dengan kata lain, agen mensyaratkan kapasitas mengorganisasi.

Dalam konteks gerakan hijau, cakupan agen ini bisa merentang luas, dari individu sampai organisasi-organisasi berskala internasional. Jika masing-masing agen mampu merumuskan dan melakukan keputusan tertentu berkaitan dengan solusi krisis ekologis, dan di antara mereka terdapat relasi dan jaringan kerja, sebagaimana yang selama ini telah terjadi, maka bisa dibayangkan bahwa masyarakat dunia akan tetap mampu mempertahankan kelangsungan bumi.

Aktor atau agen gerakan hijau, menurut Parkin (1988) sebagaimana dikutip oleh Goodin (1992), dapat dibedakan ke dalam empat kategori aktor, yakni: (1) orang-orang yang memberikan contoh praktis tentang bagaimana menerapkan gaya hidup "hijau", yang meliputi para petani organik, orang yang mengembangkan teknologi alternatif dan lain-lain; (2) kelompok-kelompok penekan berisus tunggal; (3) orang-orang yang bekerja dengan contoh dan propaganda dalam kemapanan yang ada, seperti partai politik, gereja, universitas, dan lain-lain; dan (4) secara distingtif partai politik hijau (*green party*). Menurut Parkin, keempat kategori aktor gerakan hijau tersebut, yang menyebar di berbagai negara, telah banyak menciptakan perubahan lingkungan dan sosial ke arah yang lebih baik.

Dalam konteks kategorisasi Parkin tersebut, NGO dapat ditempatkan ke dalam kategori pertama dan kedua. Hampir di setiap negara terdapat NGO yang memperjuangkan dan melakukan advokasi lingkungan untuk kelestarian sumberdaya alam, baik melalui aksi-aksi langsung maupun melalui forum-forum pembuatan keputusan. Sebagai contoh, tekanan dari NGO merupakan salah satu alasan mengapa PBB memasukkan isu lingkungan ke dalam daftar

isu-isu utama pada awal tahun 1970, dan dari sanalah bergulir sejumlah konferensi internasional tentang lingkungan hidup, dari konferensi Stockholm (1972) hingga KTT Bumi di New York (1997). Itu semua menunjukkan bahwa NGO merupakan salah satu agen atau aktor gerakan hijau yang memiliki pengaruh luas dalam mengatasi krisis ekologis-global. Aksi-aksi yang mereka lakukan tidak hanya mampu mengangkat isu lingkungan sebagai isu global, tetapi juga telah mampu mendorong munculnya kesadaran ekologis masyarakat dunia tentang pentingnya melindungi dan melestarikan bumi.

Model-model Gerakan NGO Lingkungan

Sesuai dengan ragam masalah ekologi dan lingkungan yang kompleks, NGO hadir dan berperan dalam rentang ragam yang hampir sama dengan masalah tersebut. Model gerakan lingkungan dapat dilihat sebagai suatu kontinum. Pada sisi ekstrem terdapat model gerakan reformis (yang berorientasi pada pandangan ekologi dangkal-antroposentrisme), sementara pada sisi ekstrem yang lain terdapat model gerakan radikal (yang berorientasi pada pandangan ekologi dalam-ecosentrisme).

Dengan melihat rentang model gerakan lingkungan sebagai kontinum dari model reformis hingga model radikal tersebut, klasifikasi model gerakan yang dirumuskan oleh Heijden (1992) agaknya relevan untuk diterapkan pada kasus NGO lingkungan di Indonesia⁸. Heijden memilahkan NGO lingkungan ke

dalam tiga model gerakan, yakni di salah satu sisi ekstrem, gerakan instrumental (*the instrumental movement*) yang dekat ke model gerakan reformis, di sisi ekstrem lainnya, gerakan kontra-kultural (*the contra-cultural movement*) yang dekat ke model gerakan radikal, dan di tengah-tengah kedua posisi ekstrem tersebut, gerakan sub-kultural (*the sub-cultural movement*).

Pertama, NGO lingkungan dengan model gerakan instrumental memiliki tujuan yang berada di luar gerakan itu sendiri. Heijden membedakan NGO dengan model gerakan ini ke dalam tiga tipologi berikut:

- a. Konservasionis (*conservationist*), yakni NGO yang memiliki kepedulian utama pada perlindungan alam atau suatu area alam tertentu. WWF dan cabang-cabangnya di berbagai negara dan juga *the Sierra Club, the Nature of Conservancy, the Sea Shepherd Conservation Society, the Jefferson Land Trust, dan the Sempervirens Fund* (di USA), merupakan contoh dari tipologi ini. Tipe NGO ini cenderung moderat dalam melakukan pelbagai aktivitas lingkungan. Ke dalam tipologi ini bisa juga dimasukkan NGO preservasionis, yang umumnya lebih memiliki kecenderungan moderat daripada radikal. NGO yang termasuk dalam klasifikasi preservasionis ini, misalnya *the Audubon Society, the Wilderness Society* dan *the National Wildlife Federation*, di Amerika Serikat.
- b. Pengkampanye kebijakan (*the policy campaigners*), yakni NGO yang mencoba mempengaruhi para pembuat kebijakan lingkungan. Mengkampanyekan suatu kebijakan lingkungan merupakan kegiatan utamanya. Tipe NGO ini biasanya juga merupakan penasihat dalam pembuatan kebijakan dan secara finansial didukung oleh para pemegang otoritas. NGO ini secara umum memiliki kecenderungan moderat.
- c. Mobilisator (*the mobilisers*), yakni NGO yang aktivitas utamanya menggerakkan publik dalam suatu aksi lingkungan. Aksi ini biasanya ditujukan kepada pemegang otoritas atau pelaku bisnis yang keputusan atau perilakunya membahayakan lingkungan.

⁸ Untuk konteks NGO Indonesia, sebenarnya telah dikembangkan setidaknya dua tipologi gerakan NGO. Akan tetapi, tipologi tersebut tidak dikembangkan secara khusus untuk konteks NGO lingkungan, dan karenanya menjadi tidak relevan diterapkan. Tipologi yang pertama adalah tipologi universal yang dikembangkan oleh Korten (1990) yang membedakan NGO ke dalam empat generasi NGO berdasarkan orientasi strategi program pembangunan yang dilakukan. Generasi pertama disebut dengan Bantuan Peringatan dan Kesejahteraan (*Relief and Welfare*), generasi kedua disebut Pembangunan Komunitas (*Community Development*), generasi ketiga disebut dengan Pembangunan Sistem-sistem Berkelanjutan (*Sustainable Systems Development*), dan generasi keempat disebut dengan Gerakan Rakyat (*People's Movement*). Lihat, David C. Korten, *Getting to the 21st Century: Voluntary Action and the Global Agenda*, Connecticut: Kumarian Press, 1990. Atau dalam versi terjemahan, Korten, *Menuju Abad ke-21, Tindakan Sukarela dan Agenda Global*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Pustaka Sanat Harapan, 1993.

Sedangkan tipologi kedua dikembangkan oleh Fakhri (1996). Ia mengklaim bahwa tipologi yang dikembangkan merupakan hasil refleksi para aktivis NGO Indonesia. Tipologi ini didasarkan pada perspektif para aktivis NGO tentang perubahan sosial dan pembangunan. Fakhri menyebut tipologi ini sebagai Peta Paradigma LSM, yang terbagi ke dalam tiga paradigma, yakni konformisme, reformasi, dan transformasi. Fakhri menyimpulkan bahwa kebanyakan aktivis NGO dan NGO di Indonesia berada pada tipe kedua, yakni memposisikan diri sebagai reformis dengan orientasi utama gerakannya dalam kerangka developmentalisme. Lihat, Mansour Fakhri, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Kedua, NGO lingkungan dengan model gerakan sub-kultural mempunyai tujuan yang lebih melekat pada gerakan itu sendiri. NGO ini biasanya tidak cukup independen dari pemegang otoritas. Kepedulian dan kegiatan utama dari model gerakan ini adalah mencoba menunjukkan alternatif-alternatif cara hidup yang lebih dekat dan harmonis dengan alam kepada masyarakat. NGO ini tidak berupaya mengubah kebudayaan, tetapi mendorong masyarakat untuk lebih peduli dengan lingkungan dan menunjukkan beberapa kemungkinan upaya itu di dalam kebudayaan yang ada. Heijden membagi NGO ini ke dalam dua tipe berikut.

- a. NGO pendidikan (*the educational NGO*) yang pada umumnya telah berdiri sejak lama dan dekat dengan NGO konservasionis. Di antara tujuan NGO ini adalah mendidik masyarakat atau segmen masyarakat khusus seperti anak-anak tentang masalah lingkungan dan mendorong mereka ke arah perubahan sikap dan perilaku terhadap alam dan lingkungan. NGO yang berlandaskan pada orientasi nilai ekologi sosial, agaknya bisa dimasukkan ke dalam tipologi ini, seperti *the Student Environmental Action Coalition* (SEAC) di Amerika Serikat.
- b. NGO dengan alternatif-contoh (*the 'alternative-exemplaric' NGO*) yang tujuan utamanya adalah menunjukkan kepada masyarakat contoh-contoh cara hidup alternatif. Cara-cara hidup alternatif itu biasanya tidak sulit diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan tidak memerlukan perubahan kultural yang radikal, tapi lebih pada perubahan dalam sub-kultural saja. *The Small Earth* merupakan contoh tipikal dari NGO ini.

Ketiga, NGO lingkungan dengan model gerakan kontra kultural memiliki tujuan yang abstrak dan radikal yang berada di luar gerakan itu sendiri. Keberhasilan tidak mudah dicapai oleh NGO ini, karena karakternya yang kurang realistis. Gerakan lingkungan utama yang dilakukan adalah menentang setiap bentuk kebudayaan yang merusak lingkungan. Sebab dari kerusakan lingkungan dilihat sebagai berada dalam masyarakat konsumsi-kapitalistik, teknokratik dan berskala besar. NGO ini biasanya mempromosikan bentuk organisasi masyarakat yang cenderung sosialis, ekologis dan berskala kecil.

NGO lingkungan yang berpegang kuat pada pandangan ekologi dalam, yang mencakup pandangan bioregionalisme, ecofeminisme dan hipotesis Gaia, bisa dimasukkan ke dalam klasifikasi ini. Sebagai contoh, *the Cascadia Institute of Seattle* (yang didirikan oleh David McCloskey) dan *Planet Drum* (dengan pandangan dasar bioregionalisme) dan juga *the Womyn's Caucus* (dengan pandangan dasar ecofeminisme).

Model-model Gerakan NGO Lingkungan Kasus

Tidak seluruh NGO yang diteliti secara eksplisit menyatakan dirinya sebagai NGO lingkungan. Untuk sebagian, lebih tepat jika dikatakan bahwa mereka memiliki program-program yang bertautan erat dengan isu lingkungan. Karena itu, dalam pengertian yang lebih longgar, untuk konteks tulisan ini, NGO lingkungan adalah NGO yang memiliki *concern* dan program untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan, sebagaimana terlihat pada tabel.

Agaknya tidak mudah mengukur secara pasti tingkat keberhasilan program-program aksi kedelapan NGO lingkungan tersebut dalam menawarkan solusi atas berbagai masalah lingkungan. Akan tetapi, temuan penelitian menunjukkan bahwa apa yang berhasil mereka capai melalui program-program aksi tersebut, dampaknya masih cenderung pada skala mikro.

Dari gerakan konsumen hijau, Elkahai telah berhasil mendidik sejumlah motivator yang akan menjadi agen dari penyebaran gagasan mengenai pola konsumsi dan produksi hijau. Sayangnya, Elkahai tidak lagi aktif dan memiliki instrumen untuk memantau apa yang selanjutnya dilakukan oleh para motivator tersebut. Pada isu advokasi lingkungan, Elkahai bersama dengan NGO dan aktor lain telah berhasil mengangkat kasus-kasus proyek pembangunan yang mengancam lingkungan di Yogyakarta seperti kasus mega proyek Parangtritis dan Padang Golf Cangkringan. Juga, meskipun dalam skala yang terbatas, Elkahai telah mampu menyediakan media bagi pengaduan-pengaduan konsumen.

Di bidang kesehatan, Lessan telah melakukan upaya sosialisasi penggunaan cara pengobatan tradisional dalam kerangka meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan secara mandiri. Upaya itu antara lain dilakukan melalui pendidikan dan publikasi mengenai jenis-jenis tanaman obat dan cara

Entry point dan Program Aksi
NGO Lingkungan Kasus

NAMA NGO	GERAKAN	PROGRAM AKSI
• Yayasan Lingkaran Konsumen Hijau Indonesia (Elkahai)	Pendidikan dan Advokasi Konsumen Hijau	1. Pendidikan konsumen hijau 2. Advokasi kasus lingkungan hidup 3. Advokasi konsumen 4. Aksi-aksi <i>public opinion</i> melalui media massa
• Lembaga Studi Kesehatan (LESSAN)	Cara pengobatan tradisional (Herbal Medicine)	1. Pendidikan Masyarakat 2. Kebun tanaman obat 3. Penerbitan Majalah 4. Pendampingan Kelompok (bakul jamu)
• Sekretariat Pelayanan Tani dan Nelayan Hari Pangan Sedunia (SPTN HPS)	Sistem pertanian dan kenelayan yang lestari	1. Sosialisasi sistem pertanian dan kenelayan yang lestari 2. Penerbitan majalah 3. Pembentukan dan pelatihan kader penggerak 4. Penguatan ekonomi petani dan nelayan 5. Pembuatan Demonstration Plot (Demplot)
• Lembaga 'Sikep' (LS)	Pengendalian Hama Terpadu (PHT)	Pendidikan PHT melalui kelompok tani
• Yayasan Mitra Tani (YMT)	Pendampingan petani dan pengusaha kecil pedesaan	1. Sekolah Lapang Petani (SLP) 2. Pengembangan Organisasi Petani (POP) 3. Kelompok Koperatif 4. Fair Trade
• UPKM CD-Bethesda	Pelayanan Kesehatan Primer (PKP)	1. Pembentukan dan Pelatihan Kader Kesehatan Desa (KKD) 2. Peningkatan pendapatan 3. Sosialisasi cara pengobatan tradisional (<i>herbal medicine</i>) 4. Pengadaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan 5. Rehabilitasi Lahan Kritis
• LBH Yogyakarta (LBHY)	Bantuan Hukum dan Advokasi Lingkungan	1. Pelayanan bantuan hukum terhadap komunitas korban dampak lingkungan 2. Advokasi lingkungan hidup
• Yayasan Dian Desa (YDD)	Teknologi Tepat Guna (TTG)	1. SODIS (Solar Water Disinfectant) Pengolahan limbah cair untuk industri kecil 2. Incinerator limbah klinis untuk Rumah Sakit 3. CIUD (Community Involvement in Urban Development) 4. Tungku Biomas

Sumber: data primer

meramunya sebagai alternatif dari obat-obat modern. Lessan bahkan mengembangkan kebun tanaman obat sebagai bentuk upaya pelestarian tanaman obat yang langka dan sekaligus memasok kebutuhan ramuan obat tradisional. Secara khusus, Lessan juga meningkatkan pengetahuan dan penguatan basis organisasi para bakul jamu yang biasanya berkeliling desa.

Masih dalam kaitan dengan kesehatan, upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara mandiri juga dilakukan oleh CD Bethesda. Berbeda dengan Lessan, CD Bethesda mempergunakan metode kader, yakni dengan merekrut dan mendidik Kader Kesehatan Desa (KKD) sebagai agen pelayanan kesehatan di daerah pedesaan. Suatu program yang kemudian dikenal dengan program PKP. Di samping mendapat pengetahuan medis modern, KKD juga mendapatkan pengetahuan medis-tradisional, seperti pengetahuan tentang tanaman-tanaman obat dan jenis-jenis ramuan untuk pengobatan. Program PKP tersebut didukung oleh program lain seperti konservasi lingkungan, misalnya pemanfaatan gua sebagai sumber air bersih di Gunung Kidul, rehabilitasi lahan kritis, pengadaan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dari gerakan pertanian lestari, gerakan yang dipelopori para Romo (Gereja Khatolik) melalui wadah SPTN HPS setidaknya telah berhasil melakukan penyadaran tentang pentingnya pertanian lestari di kelompok-kelompok petani di berbagai daerah, baik di Jawa maupun luar Jawa (Sumatra). Penerapan sistem pertanian organik memang tidak dilakukan secara total, karena sistem pertanian modern yang telanjur melembaga di kalangan petani. Meskipun terdapat banyak kendala ekologis dan ekonomis, ide dan penerapan pertanian lestari, seperti penggunaan bibit lokal, kompos, pemanfaatan predator alami, dan lain-lain, telah diterima oleh banyak kelompok tani, yang tampak dari jumlah kelompok petani yang terus bertambah, terutama berkat upaya promosi dan sosialisasi yang berhasil.

Keberhasilan SPTN HPS nampaknya juga diikuti oleh LS yang pada level komunitas berhasil mengenalkan PHT tanpa bahan kimiawi dan pemanfaatan pemberantasan hama dengan pengetahuan lokal. Dalam skala yang lebih besar, YMT juga berhasil memperkenalkan PHT non-pestisida dan lebih dari itu memfasilitasi cara pertanian organik melalui SLP dan penguatan jaringan kelompok petani organik. Keberhasilan cara pertanian lestari, misalnya, dapat dijumpai pada kasus kelompok tani di Mangunsari, Magelang, yang telah

mampu memproduksi secara kontinyu dan memasarkan hasil pertanian kepada kelompok konsumen yang lebih luas, tentunya dengan dukungan YMT. Dalam kaitan dengan pemasaran produk pertanian organik, YMT bersama NGO lain telah mendirikan Konsorsium *Fair Trade* untuk mendukung pemasaran produk tersebut kepada konsumen yang lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri.

Dalam isu penegakan hukum lingkungan, LBHY memiliki divisi lingkungan hidup yang secara khusus memfokuskan perhatian pada advokasi dan bantuan hukum lingkungan, terutama kepada komunitas korban kerusakan lingkungan. Pengaduan kasus lingkungan hidup yang masuk ke LBHY tergolong sedikit, sehingga kasus yang ditangani dan mampu diselesaikan masih pun sangat sedikit dibanding kasus-kasus hukum lainnya. Betapapun LBHY telah menjadi tempat untuk mengadu dan memperjuangkan hak-hak atas sumberdaya alam bagi komunitas yang terkena dampak kerusakan lingkungan.

Dalam konteks perkembangan teknologi yang makin ditandai oleh konsumsi energi yang besar dan merusak ekologi, program aksi YDD secara konsisten menawarkan teknologi alternatif yang akrab lingkungan, sejak awal tahun 1970-an. YDD telah menguji-coba dan mengembangkan berbagai bentuk teknologi alternatif, seperti SODIS untuk mendapatkan air yang steril melalui pemanfaatan sinar matahari, incinerator untuk mengolah limbah klinis rumah sakit secara murah, RBC untuk mengolah limbah industri kulit dan tahu tempe, dan tungku biomas yang lebih murah dan tidak membuat polusi. Semua itu merupakan bentuk-bentuk teknologi yang murah, hemat bahan bakar dan tidak merusak lingkungan, atau biasa disebut juga dengan teknologi lunak (*soft technology*). Memang tidak mudah untuk memperkenalkan dan meyakinkan masyarakat dan kalangan bisnis tentang manfaat dan arti penting teknologi ini bagi ekologi, akan tetapi program YDD yang merupakan *social marketing*, seperti SODIS dan tungku biomas mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, yang tampak dari pemakaian teknologi tersebut yang makin meluas.

Dari pemaparan tentang titik masuk dan berbagai program aksi lingkungan di atas, mengikuti tipologi Heijden (1992), tampak ada paralelitas model gerakan lingkungan yang dilakukan, yakni cenderung kepada model gerakan sub-kultural. Ciri-ciri model gerakan ini terlihat melekat pada kedelapan NGO

tersebut. Pertama, mereka tidak cukup independen dari pemegang otoritas (pemerintah). Ini terlihat dari keengganan atau mungkin kekurang-tegasan mereka dalam mengambil sikap terhadap suatu kebijakan pemerintah yang terkait dengan program aksinya. Dalam isu pertanian organik, misalnya, NGO yang bergerak di bidang ini tidak secara tegas menolak kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkesan memaksa petani menggunakan sistem pertanian modern yang merusak ekologis. Singkatnya, sikap mereka terkesan hati-hati, untuk tidak mengatakan adanya kecenderungan sikap akomodatif terhadap program pemerintah.

Kedua, kepedulian dan kegiatan utama mereka, meskipun dengan titik masuk dan program aksi yang berbeda-beda, pada dasarnya berupaya menunjukkan alternatif-alternatif cara hidup yang lebih akrab dan harmonis dengan alam kepada masyarakat. YDD menunjukkan contoh TTG yang lebih akrab lingkungan. SPTN, YMT dan LS memberikan alternatif terhadap sistem pertanian modern yang cenderung merusak ekologi. Sementara itu, Lessan dan CD-Bethesda mempromosikan cara-cara pelayanan kesehatan, yang lebih murah secara ekonomi, lebih aman secara medis, dan lebih menunjang keanekaragaman hayati.

Ketiga, sekalipun mereka mengajukan alternatif-alternatif cara hidup yang lebih ramah lingkungan, pada dasarnya mereka tidak berupaya mengubah kebudayaan dominan yang berlaku dalam masyarakat. Mereka hanya mendorong masyarakat untuk lebih peduli dengan lingkungan dan menunjukkan beberapa kemungkinan upaya itu di dalam konteks kebudayaan yang ada. Sebagai contoh, meskipun Elkahai mempromosikan pola konsumsi hijau, pada dasarnya ia tidak menentang budaya kapitalis yang mendasari pola konsumsi masyarakat sekarang. Sosialisasi cara produksi pertanian lestari yang dilakukan oleh SPTN, YMT dan LS, bukan merupakan penolakan terhadap cara produksi modern-kapitalistik, karena mereka hanya memberikan input-input produksi yang lebih akrab atau peduli dengan lingkungan hidup.

Masih dalam konteks model gerakan sub-kultural ini, merujuk kepada Heijden (1992) kedelapan NGO lingkungan bisa disebut sebagai NGO pendidikan dan NGO dengan alternatif contoh. Disebut sebagai NGO pendidikan, karena mereka pada dasarnya memberikan input-input pendidikan kepada masyarakat melalui berbagai program aksi tentang masalah lingkungan hidup, seperti konsumsi hijau, pertanian lestari atau organik, pelayanan

kesehatan dan pengobatan yang lebih alami, advokasi lingkungan dan teknologi yang akrab lingkungan.

Sedangkan tendensi sebagai NGO dengan alternatif contoh (*the 'alternative-exemplistic' NGO*), tampak dari upaya-upaya mereka dalam menunjukkan contoh-contoh cara hidup alternatif, tanpa perlu melakukan perubahan kultural secara radikal, melainkan hanya perubahan-perubahan pada dataran sub-kultural. Upaya ini terutama terlihat pada NGO lingkungan yang bekerja pada masalah pertanian, yang mengenalkan input-input dan cara produksi pertanian yang organik, tanpa harus menolak input-input produksi dan cara pertanian modern.

Limitasi-limitasi

Dari penampakan program-program aksi tersebut, terlihat beberapa limitasi berikut. Pertama, apa yang mereka lakukan lebih merupakan upaya pemecahan masalah di lapangan, misalnya dengan mendampingi korban kerusakan lingkungan, memfasilitasi rehabilitasi kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Aksi-aksi tersebut kurang menekankan pada upaya pemecahan masalah yang langsung pada sumber penyebab masalahnya. Mereka memang melihat bahwa sumber penyebab masalah lingkungan dan ekologi ditemukan pada bekerjanya nilai-nilai kultural yang cenderung konsumtif dan merusak lingkungan. Mereka melihat sebab masalah lingkungan berada pada "*the big-scale*" dan masyarakat konsumsi yang kapitalistik. Namun demikian, mereka belum banyak melakukan aksi-aksi yang secara langsung melakukan kritik, protes, dan tuntutan perubahan kebijakan publik-lingkungan yang lebih radikal.

Iktim politik Orde Baru yang kurang memberi ruang gerak yang leluasa kepada NGO agaknya merupakan kendala utama dari upaya-upaya dan aksi-aksi lingkungan yang lebih radikal. Itulah sebabnya, tipologi NGO lingkungan kontra-kultural belum menampakkan ciri dan sosoknya yang jelas, sebagaimana NGO-NGO lingkungan di negara-negara maju dan demokratis, seperti di Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa Barat.

Limitasi gerakan NGO lingkungan berikutnya, kedua, berkaitan dengan metode pendidikan tentang bagaimana memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran lingkungan kepada masyarakat yang umumnya

awam terhadap masalah lingkungan. Ini terjadi karena problem lingkungan bertaut erat dengan penjelasan ilmiah, yang tentunya tidak mudah dipahami oleh orang awam. Sebagai contoh, sungguh tidak mudah bagi para aktivis NGO untuk menjelaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa aktivitas yang mereka lakukan sebenarnya memiliki resiko atau dampak negatif terhadap lingkungan. Pemahaman dan kesadaran bahwa modernisasi pertanian bisa membawa dampak negatif pada ekologi, misalnya, memerlukan proses pendidikan yang panjang dan intens. LS, misalnya, membutuhkan tidak kurang dari satu tahun untuk meyakinkan komunitas sarannya tentang dampak ekologis dari cara pertanian modern dan mengajak mereka untuk menggunakan cara-cara pertanian yang lebih alami dan akrab lingkungan. Demikian pula dengan dampak negatif dari cara-cara pengobatan modern, dampak ekologis dan ekonomi dari pola konsumsi yang telanjur melembaga dalam masyarakat, pentingnya penggunaan teknologi tepat guna yang lebih akrab lingkungan, dan perlunya advokasi lingkungan untuk menjamin hak dan kepentingan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Kesulitan itu terutama berakar secara inheren dari karakteristik dan masalah lingkungan itu sendiri. Pertama, masalah lingkungan acapkali tidak secara langsung dapat diamati atau divisualisasikan. Kedua, meskipun banyak orang merasakan akibat tidak langsung dari masalah lingkungan, mereka tetap merasa berjarak dari akibat langsungnya. Yang terakhir, bahkan jika suatu masalah lingkungan dipertimbangkan, hal itu tidak secara otomatis akan diikuti oleh tindakan pemecahan (Garner, 1996: 8-9).

Refleksi Teoritis dan Praktis

Dari berbagai aktivitas lingkungan yang diperlihatkan oleh delapan NGO kasus di atas, apa yang mereka lakukan tampak sebagai serpihan-serpihan aksi yang seolah tidak mengimbas pada konteks sosial dan lingkungan yang lebih luas. Namun, jika dilihat pada level mikro, maka upaya-upaya pemecahan masalah lingkungan yang mereka lakukan telah mendatangkan hasil yang berarti, terutama apabila skala aksi tersebut bisa diperbesar (*scaling-up*). Ini memang sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Tetapi, kemungkinan ke arah *scaling-up* tetap terbuka. Argumen pokoknya adalah bahwa gerakan lingkungan kini telah bersifat global dan telah tercapai sinergi yang luas di antara banyak

agen atau aktor gerakan di dunia yang berupaya terus mencari dan melakukan solusi terhadap krisis lingkungan global.

Dengan arah kecenderungan seperti itu, maka kita dapat menduga bahwa gerakan hijau ini akan semakin membesar dan menguat di masa datang baik di negara-negara berkembang⁹ seperti Indonesia, dan juga di negara-negara maju, sebagai bagian dari gerakan sosial baru¹⁰ (*new social movement*) yang meliputi gerakan HAM, gender, perdamaian dan demokratisasi. Gerakan sosial baru, berbeda dengan gerakan sosial lama, menolak analisis sosial Marx tentang ketegangan yang terus menerus antara kaum proletar dan borjuis. Agen dan partisipan gerakan sosial baru melampaui batas-batas kelas sosial dan memperjuangkan transformasi sosial yang lebih luas. Menguatnya gerakan hijau ini barangkali bisa dilihat dari makin nyaringnya gema advokasi lingkungan yang disuarakan oleh kalangan NGO dan kelompok-kelompok peduli lingkungan lainnya. Hampir setiap kasus kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam mendapatkan perhatian dari mereka dan disiarkan melalui media massa. Tidak heran jika jargon-jargon lingkungan hidup, yang semula hanya dimengerti oleh sedikit orang, saat ini telah merambah semua pihak. *Environmentalism* dan *environmentalist* telah ada di mana-mana (Saidi, 1995: 13).

Pada area teoritis, kesadaran dan kepedulian terhadap krisis lingkungan global juga telah melahirkan sejumlah pemikiran ekologis, atau apa yang mutakhir sekarang disebut dengan *green perspective*, *green theory*, *green politics*, dan konsep-konsep lain yang menggunakan ungkapan *green* (hijau). Salah satu pemikiran yang direspon secara luas dan terus menimbulkan perdebatan adalah pemikiran *the Club of Rome* yang telah mempublikasikan buku *Limits to Growth* pada tahun 1972. Dengan pendekatan Malthusian yang kuat, kelompok ini meramalkan bahwa jika kecenderungan pertumbuhan penduduk dunia,

⁹ Untuk gerakan sosial baru di negara-negara Amerika Latin, lihat antara lain Frans J. Schuurman, "Modernity, Post Modernity and New Social Movements", dalam Schuurman, (1994), *Beyond the Impasse, New Direction in Development Theory*, Zed Books, London & New York. Juga, Carry A. Meyer, "NGOs and Environment Public Goods: Institutional Alternatives to Property Rights", dalam *Development and Change*, Vol. 27, July 1996.

¹⁰ Untuk diskursus lebih lanjut tentang gerakan sosial baru ini, lihat Anthony Giddens, *Beyond Left and Right, The Future of Radical Politics*, Polity Press, 1994; Frans J. Schuurman, *Beyond The Impasse, New Directions in Development Theory*, Zed Books, 1994. Untuk edisi bahasa Indonesia lihat Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

industrialisasi, polusi, produksi makanan, dan penipisan sumberdaya terus tidak dapat dikendalikan maka batas pertumbuhan planet ini akan tercapai dalam 100 tahun mendatang. Argumentasi dasar kelompok ahli ini terus diperkuat dan dipublikasikan melalui buku *Beyond Limit to Growth* (Meadows dkk, 1992).

Dalam konteks mutakhir perkembangan krisis lingkungan global, menurut Goodin (1992), apa yang diperlukan baik dalam aras pemikiran maupun aras gerakan hijau adalah perspektif global, meskipun dalam tindakan berada pada aras lokal, *think globally, act locally* (berfikir global, bertindak lokal).¹¹ Cara berfikir dan bertindak inilah yang kini banyak diterapkan oleh berbagai organisasi lingkungan di berbagai penjuru dunia. Upaya-upaya perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam oleh berbagai agen atau aktor sosial didasari pada pemikiran untuk menghormati dan menyelamatkan planet bumi, sekalipun program-program aktual mereka berada pada level lokal. Sebagai contoh, berbagai NGO di Brasil, yang mengembangkan jaringan ke seluruh NGO di dunia memprotes pembangunan besar-besaran di wilayah hutan Amazone, yang merupakan salah satu dari paru-paru dunia. Cara berfikir dan bertindak terhadap krisis lingkungan ini agaknya merupakan pekerjaan rumah yang perlu segera dikerjakan oleh NGO lingkungan di Indonesia.

¹¹ Pengertian bertindak lokal menunjuk pada tindakan yang dilakukan pada level nasional atau regional, meskipun isu utamanya merupakan isu global. Cara berfikir dan bertindak ini, menurut Clark, dianggap kurang relevan. Yang lebih relevan adalah cara yang sebaliknya, yakni berpikir lokal, bertindak global. Ia mencontohkan NGO yang bekerja sama dengan penduduk yang tinggal di pinggiran hutan di seluruh negara dunia ketiga, menentang operasi besar-besaran dari perusahaan-perusahaan kayu yang hanya memberi kesejahteraan nasional, tapi menimbulkan kesengsaraan penduduk yang tinggal di situ. Lihat, John Clark, (1990), *Democratizing Development, The Role of Voluntary Organizations*, atau dalam versi terjemahan, *NGO dan Pembangunan Demokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.

Daftar Pustaka

- Berger, Johannes., "The Economy and the Environment", dalam Neil J. Smelser dan Richard Swedberg, (Eds.), *Handbook of Economic Sociology*, New York: Russel Sage Foundation, 1994.
- Clark, John, *NGO dan Pembangunan Demokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.
- Durning, Alan B., "Action at the Grassroots: Fighting Poverty and Environment Decline", *Worldwatch Paper* No. 88, 1989.
- Eldridge, Philip J., *Non-Government Organizations and Democratic Participation in Indonesia*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1995.
- _____, "LSM dan Negara", dalam *Prisma*, No. 7, 1989
- _____, "NGOs in Indonesia: Popular Movement or Arm of Government?", *Working Paper* No. 55, The Centre Southeast Asian Studies Monash University, Australia, 1989
- Fakih, Mansour, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Farrington, John & David J. Lewis, (ed.), *Non-Governmental Organizations and The State in Asia, Rethinking Roles in Sustainable Agricultural Development*, London: Roulledge, 1993.
- Frank, Irene & Brownstone, David., *The Green Encyclopedia, An A-to-Z Sourcebook of Concerns and Solutions*, New York: Prentice Hall General Reference, 1992.
- Garner, Robert, (1996), *Environmental Politics*, Prentice Hall, London.
- Giddens, Anthony, *Beyond Left and Right, The Future of Radical Politics*, Cambridge: Polity Press, 1995.
- Goodin, Robert E., *Green Political Theory*, Cambridge: Polity Press, 1992.
- Hannigan, John A., *Environmental Sociology, A Social Constructionist Perspective*, London: Roulledge, 1995.
- Hardjasoemantri, Koesnadi., "Kata Pengantar" dalam buku Kirkpatrick Sale *Revolusi Hijau, Sebuah Tinjauan Historis-Kritis Gerakan Lingkungan Hidup di Amerika Serikat*, Jakarta: YOI, 1996.

- Homer-Dixon, Thomas F., "Environmental Scarcity and Violent Conflict: Evidence from Cases", dalam *International Security*, Vol. 19, 1994.
- Jary, David & Jary, Julia., *Dictionary of Sociology*, New York: Harper Collin Publisher, 1992.
- Kamil, Abdullah., (1995), "Napak Tilas Pembangunan Lingkungan Hidup", dalam Majalah *Pancaroba*, musim Kemarau, Jakarta: DML, 1995.
- Korten, David C., *Getting to the 21st Century: Voluntary Action and the Global Agenda*, Connecticut: Kumarian Press, 1990.
- Long, Norman., "From Paradigm Lost to Paradigm Regained? The Case for an Actor-oriented Sociology of Development", dalam *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, No. 49, 1990.
- Kompas*, 22 September 1997
- Meadows, Donella H., Dennis L. Meadows, dan Jorgen Randers, *Beyond the Limits*, London: Earthscan Publications Limited, 1992.
- Meyer, Carry A., "NGOs and Environment Public Goods: Institutional Alternatives to Properties Rights", dalam jurnal *Development and Change*, Vol. 27, July, 1996.
- Mies, Maria. & Shiva, Vandana., *Ecofeminism*, London & New Jersey: Zed Books, 1993.
- Purnomo, Agus., Erna Witoelar, Martha Belcher, "Institutional Strengthening of Environmental NGOs in Indonesia", Paper untuk Asian Development Bank, oleh the Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC) Manila, Philipina, 1989.
- Riker, James V., "Contending Perspective for Interpreting Government-NGO relations in South and Southeast Asia: Constraints, Challenges, and The Search for Common Ground in Rural Development", Paper yang disiapkan untuk Joint Project on the Role of NGOs in Development, yang diselenggarakan oleh APDC Kuala Lumpur, ONGOC Manila, dan UNDP, 6 Desember 1990.
- Rutte, Stefan., (1996), *Bringing the Environment to the Public, Environmental Education of Non Governmental Organizations in Thailand and the Netherlands*, Social Environmental Studies, University of Nijmegen, the Netherlands, 1996, didownload dari jaringan internet.

- Saidi, Zaim., *Secangkir Kopi Max Havelaar, LSM dan Kebangkitan Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Sale, Kirkpatrick., (1996), *Revolusi Hijau, Sebuah Tinjauan Historis-Kritis Gerakan Lingkungan Hidup di Amerika Serikat*, Jakarta. Yayasan Obor Indonesia, 1996.
- Shiva, Vandana, et al., *Perspektif Sosial dan Ekologi Keragaman Hayati*, Jakarta: Konphalindo, 1993.
- Schuurman, Frans J. (Eds.), *Beyond the Impasse, New Direction in Development Theory*, London & New Jersey: Zed Books, 1994.